



# RAPOR TRIWULAN 1

Badan Keuangan dan Aset Daerah

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**2024**

# RAPOR KINERJA

**Ranking: 35**

**Predikat SAKIP: A**

**Rata-Rata Nilai: 92.74%**

**Predikat: Baik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100	600000	600000	100.00
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan	38	38	100	8840780010	1322616607	14.96
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya	1	1	100	345226190	101452970	29.39
4	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor	1	1	100	194997500	108750000	55.77
5	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100	100063200	15860000	15.85

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
6	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100	250000 000	314457 15	12.58
7	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya layanan listrik	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik	1	1	100	216000 000	377528 48	17.48
8	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpenuhinya kebutuhan air	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air	1	1	100	900000 0	861060	9.57
9	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya layanan telepon	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon	1	1	100	168000 00	245257 0	14.60
10	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor	1	1	100	105456 000	121680 00	11.54
11	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor	1	1	100	105456 000	811200 0	7.69
12	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Operator Komputer	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer	1	1	100	527280 00	811200 0	15.38

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
13	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi	Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi	1	1	100	105456 000	121680 00	11.54
14	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpeliharanya kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik	2	2	100	168000 00	670000 0	39.88
15	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terpeliharanya sarana dan prasarana	Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana	1	1	100	630000 00	145000 00	23.02
16	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terverifikasinya DPA Perangkat Daerah	Jumlah DPA PD yang terverifikasi	56	56	100	131840 000	122880 000	93.20
17	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	2	2	100	337350 000	677250 00	20.08
18	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	100	562074 900	808500 00	14.38
19	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD)	Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD)	1	1	100	668090 00	405600 0	6.07

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
20	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah	90	90	100	702498 00	165300 00	23.53
21	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	1	1	100	253427 300	197845 00	7.81
22	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah	Persentase permohonan SP2D yang terlayani	25	25	100	319981 500	225656 000	70.52
23	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semester	1	1	100	133454 000	405600 0	3.04
24	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	Jumlah Dokumen Buku LKPD	1	1	100	127592 500	988000 0	7.74
25	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi	% persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu	25	25	100	454693 967978	185220 412249	40.74
26	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersalirkannya Dana Darurat dan Mendesak kepada SKPD sesuai dengan Ketentuan	Jumlah SKPD yang menerima Dana Darurat dan Mendesak	26	1	3.85	772455 0000	850365 00	1.10

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sasaran Sub-kegiatan	Indikator Sub-kegiatan	Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
27	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	OPINI BPK	Tersertifikasinya bidang tanah BMD	Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat	1	0	0	900000 000	405600 0	0.45
					Rata-rata:		92.74			39.42

**Rekomendasi:**

*Generated by E-SAKIP 2024*